

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
FASILITAS PEMBELAJARAN PAI DI DAERAH TERPENCIL
(STUDI KASUS DI SDN 6 DABUN GELANG)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**TRI ANNISA
NIM: 210201067**

**Mahasiswi Fakultas Tarbiyah Keguruan
Program Studi Pendidikan Agama Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN
1447 H/2025 M**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
FASILITAS PEMBELAJARAN PAI DI DAERAH TERPENCIL
(STUDI KASUS DI SDN 6 DABUN GELANG)**

SKRIPSI

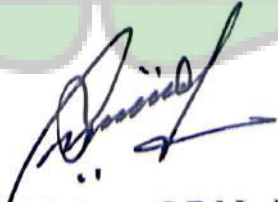
Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

TRI ANNISA
NIM.210201067

Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Disetujui Oleh:
Pembimbing



Muhammad Ichsan, S.Pd.I., M.Ag
NIP. 198401022009121003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FASILITAS PEMBELAJARAN PAI DI DAERAH TERPENCIL (STUDI KASUS DI SDN 6 DABUN GELANG)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai
Salah Satu Tugas Akhir Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at,

22 Agustus 2025 M

28 Safar 1447 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

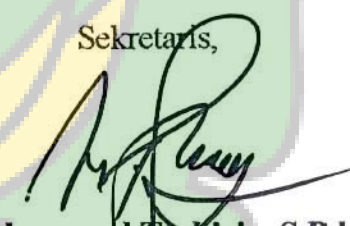
Ketua,



Dr. Muhammad Ichsan, S.Pd.I., M.Ag.

NIP. 198401022009121003

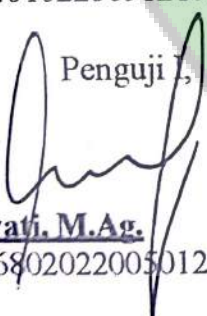
Sekretaris,



Muhammad Tsabirin, S.Pd.I., M.A.

NIP. 199005082025211022

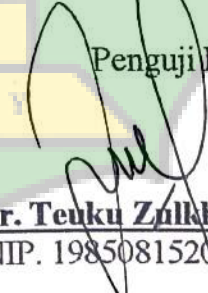
Penguji I,



Dr. Hayati, M.Ag.

NIP. 196802022005012003

Penguji II,



Dr. Teuku Zulkhairi, S.Pd.I., M.A.

NIP. 198508152011011012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry



Prof. Safrul Muhlik, S.Ag., M.A., M.Ed., Ph. D

NIP. 197301021997031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Annisa

NIM : 210201067

Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam

Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di Daerah Terpencil (Studi Kasus di SDN 6 Dabun Gelang)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah/karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya tulis saya dan telah melalui pembuktian yang dipertanggung-jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 13 Maret 2025



Yang Menyatakan

Tri Annisa

Tri Annisa

210201067

ABSTRAK

Nama : Tri Annisa
NIM : 210201067
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Fasilitas PAI, Daerah Terpencil

Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues yang berperan dalam memberikan fasilitas pembelajaran yang lengkap kepada seluruh sekolah, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun, ditemukan di SDN 6 Dabun Gelang bahwa tidak tersedianya perpustakaan yang dapat dijadikan sumber belajar tambahan, buku ajar Pendidikan Agama Islam yang masih terbatas, tidak adanya mushola dan perlengkapan ibadah lainnya. Hal ini menunjukkan fasilitas pembelajaran PAI yang belum cukup memadai. Penelitian ini merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang? 2) Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang?. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui kebijakan pemerintah daerah terhadap fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang. 2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap fasilitas PAI di SDN 6 Dabun Gelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Kepala Sekolah SDN 6 Dabun Gelang, dan dua orang guru PAI SDN 6 Dabun Gelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan khusus dalam penyediaan fasilitas pembelajaran PAI, akan tetapi dinas pendidikan sedang merancang kebijakan tersebut. Faktor pendukung kebijakan tersebut ialah komitmen pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, guru PAI yang kompeten, dan kerja sama sekolah dengan masyarakat. Adapun faktor pengambatnya ialah keterbatasan anggaran, letak sekolah yang terpencil, proses administrasi dinas pendidikan yang lambat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu sekolah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya. Beserta shalawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di Daerah Terpencil (Studi Kasus Di SDN 6 Dabun Gelang)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Pendidikan gama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghormatan dan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Safrul Muluk, M.A., M. Ed., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Marzuki, S.Pd.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Mumtazul Fikri, M.A., selaku Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mendampingi penulis selama masa studi perkuliahan dari semester awal hingga akhir, serta memberikan motivasi dan nasihat yang sangat membantu dalam perjalanan akademik penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Ichsan, S.Pd.I., M.Ag., selaku pembimbing skripsi, yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Zainal Abidin dan Almarhumah Ibunda Sarinah, kedua sosok yang paling penulis sayangi dalam kehidupan ini.

Ayahanda yang selalu mengusahakan setiap pendidikan penulis walaupun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Beribu terima kasih penulis ucapkan atas doa dan perjuangan Ayahanda selama ini. Dan juga terima kasih kepada Ibunda yang walaupun tidak sempat menemani perjalanan penyusunan skripsi ini, tetapi semasa hidupnya tak henti mendoakan setiap langkah dari penulis dan juga ikut memberikan dukungan serta motivasi di setiap rintangan hidup penulis. Kehadiran Ibunda akan selalu ada di hati dan ingatan penulis.

7. Teruntuk orang spesial Tri Annisa yang sudah berani melangkah sejauh ini. Walaupun sering bertanya selanjutnya bagaimana. Penulisan skripsi ini dirasa tidak mudah olehnya namun dia tetap mencoba walaupun penuh dengan deraian air mata.
8. Terima kasih kepada kedua kakak tercinta, Zuraida Elfiani (kakkul) dan Almaida Sazeri (kakma) yang senantiasa mengirimkan do'a, dana, canda, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa membantu penulis dalam mendoakan dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini. Terkhusus Makpah dan Pakkul yang sudah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis dalam proses wawancara dan observasi ke lokasi penelitian.
10. Kepada Sahabat-sahabat yang senantiasa membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini: Uswatun Hasanah, Chiara Putri Faliha, Nurul Aida dan semua teman yang berperan aktif membantu penulis. Penulis ucapkan terima kasih dan penulis tidak akan melupakan bantuan mereka.

Penulis menyadari bahwa banyaknya kekurangan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam peningkatan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penyediaan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran PAI.

Banda Aceh, 13 Maret 2025

Tri Annisa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional.....	7
F. Kajian Terdahulu yang Relevan	11
BAB II: KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITAS	
PEMBELAJARAN PAI.....	15
A. Kebijakan Pemerintah Daerah	15
1. Pengertian Kebijakan	15
2. Jenis dan Tahap-tahap Kebijakan.....	17
3. Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
4. Fungsi Pemerintah Daerah.....	25
B. Fasilitas Pembelajaran	30
1. Pengertian Fasilitas Pembelajaran.....	30
2. Jenis-jenis Fasilitas Pembelajaran.....	32
3. Tujuan dan Manfaat Fasilitas Pembelajaran.....	36
C. Pendidikan Agama Islam.....	38
1. Pengertian Agama Islam	38
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam.....	40
3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam.....	42
BAB III: METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB VI: KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN FASILITAS	
PEMBELAJARAN PAI DI SDN 6 DABUN GELANG	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52

B. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang	56
C. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang	62
D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang	65
BAB V: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Sarana dan Prasarana di SDN 6 Dabun Gelang	54
Tabel 4. 2 Data Guru SDN 6 Dabun Gelang.....	55
Tabel 4. 3 Data Siswa SDN 6 Dabun Gelang	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan	75
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	77
Lampiran 4: Pedoman Wawancara	79
Lampiran 5: Pedoman Observasi	82
Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*Policy*” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*Virtues*). Kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom* adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam.¹ Kebijakan merupakan hasil dari suatu keputusan yang dipikirkan dengan seksama dan hati-hati oleh pengambil keputusan pusat, bukan kegiatan berulang atau rutin yang diprogram berkaitan dengan aturan-aturan. Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan memiliki peran yang sangat penting.² Suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pemerintahan, kebijakan memiliki peran yang sangat penting. Kebijakan dijadikan dasar atau landasan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Pemerintah mengatur berbagai sektor untuk

¹ Farid Wajdi dan Andryan, “*Hukum dan Kebijakan Publik*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 2-4

² Emilda Sulasmi, “*Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan*”, (Medan: UMSU Press, 2021), h. 1

tercapainya stabilitas nasional serta mendorong pertumbuhan negara, termasuk sektor pendidikan, perekonomian, transportasi, kesehatan, dan keamanan. Setiap sektor ini memiliki peran masing-masing dalam pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan. Sektor pendidikan di Indonesia merupakan bidang yang memegang peranan utama, karena berkaitan langsung dengan upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, terampil, dan mampu bersaing dengan Negara lainnya.

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya daerah terpencil. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan adanya fasilitas pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Fasilitas pembelajaran adalah sarana dan prasarana yang membantu proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan Fasilitas pembelajaran yang lengkap dapat meningkatkan minat belajar siswa saat proses pembelajaran dan dengan adanya fasilitas belajar yang memadai seperti LCD Proyektor, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif sehingga menarik siswa untuk lebih memperhatikan pelajaran.³

Pemerintah Indonesia setiap tahun mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas pembelajaran. Sesuai dengan pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, “Negara

³ Afrida Niken, Sofyan Susanto dan Widya Trio Pangestu, “Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V Tema Peristiwa dalam Kehidupan di SDN 2 Negeri”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 1 (2022), h. 144.

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.⁴ Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah, baik ditingkat maupun pusat daerah, memiliki tanggung jawab yang konstitual dalam pemastian tersediannya dana yang memadai untuk mendukung sistem pendidikan yang berkualitas dan merata diseluruh Indonesia.

Fasilitas pembelajaran yang memadai memiliki peran penting dalam pembentukan kualitas proses pembelajaran secara menyeluruh, termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan Agama Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, keyakinan, dan praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. PAI meliputi pengajaran tentang dasar-dasar keimanan, ibadah, akhlak, hukum-hukum Islam, sejarah dan budaya Islam.⁵ Dalam pembelajaran PAI, fasilitas yang memadai dapat membuat suasana belajar yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. Fasilitas pembelajaran PAI yaitu, proyektor yang digunakan untuk membantu penayangan video ibadah dan sejarah, ketersediaan kitab suci Al-Qur'an untuk melatih bacaan tajwid peserta didik, perpustakaan yang menyediakan buku-buku Islami yang dapat dibaca oleh peserta didik guna memperluas pemahaman terhadap nilai-nilai agama,

⁴ Perubahan Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4).

⁵ Mohammad Ali dkk, *Pengantar Pendidikan Agama Islam*, (Padang: Hei Publishing Indonesia, 2024), h. 1

mushola dan tempat berwudhu untuk digunakan sebagai tempat praktik ibadah.

Penyediaan fasilitas pembelajaran oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada dinas pendidikan karena secara teknis penyediaan, pengelolaan, dan pemenuhan fasilitas pembelajaran di sekolah merupakan kewenangan langsung dinas pendidikan. Bupati berperan sebagai pengambil kebijakan secara umum, sedangkan pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan, termasuk pengadaan sarana dan prasarana di bawah tanggung jawab dinas pendidikan. Dinas pendidikan Kabupaten Gayo lues yang seharusnya memberikan fasilitas pembelajaran yang lengkap khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Sekolah Dasar Negeri 6 Dabun Gelang. Namun, berdasarkan hasil observasi awal penelti yang dilakukan di SDN 6 Dabun Gelang pada tanggal 14 April 2025, ditemukan bahwa tidak tersedianya perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan yang memperkaya pemahaman peserta didik diluar materi yang diajarkan di kelas, ketersediaan buku ajar pendidikan agama Islam yang terbatas sehingga selama proses pembelajaran beberapa peserta didik harus berbagi dengan teman yang lainnya, tidak adanya ruang ibadah (mushola) yang keberadannya sangat penting dalam praktik ibadah dan juga perlengkapan ibadah lainnya, seperti mukena, sarung, sajadah dan Al-Qur'an.⁶

⁶ Observasi di SDN 6 Dabun Gelang , 14 april 2025.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Fasilitas Pembelajaran PAI di Daerah Terpencil (Studi Kasus Di SDN 6 Dabun Gelang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terhadap fasilitas pembelajaran PAI di SDN 6 Dabun Gelang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan dalam bidang pendidikan, khususnya tentang kebijakan pemerintah daerah yang dapat berpengaruh terhadap

fasilitas pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di daerah terpencil

- b. Dapat digunakan sebagai Referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan fasilitas pembelajaran PAI yang ada di daerah terpencil agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.

b. Bagi sekolah

Penelitian ini dapat membantu sekolah melihat kekurangan fasilitas yang perlu diperbaiki dan disediakan untuk diajukan kepada pemerintah.

c. Bagi siswa

Penelitian ini dapat membantu siswa mendapatkan dan menggunakan fasilitas pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar.

d. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam memahami bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan, terutama penyediaan fasilitas pembelajaran di daerah terpencil.

E. Defenisi Operasional

1. Kebijakan

Kebijakan dalam pengertian paling dasar adalah serangkaian prinsip dan panduan yang dibuat oleh entitas atau individu untuk membimbing tindakan dan keputusan. Ini bisa berlaku untuk berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan dapat diprediksi dalam menangani isu atau situasi tertentu.

Kebijakan adalah suatu garis panduan atau kerangka berpikir yang dibuat oleh suatu entitas atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat dianggap sebagai peta jalan yang menunjukkan arah dan cara untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam praktiknya, kebijakan seringkali berfungsi sebagai panduan bagi individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kebijakan bisa bersifat umum atau spesifik, tergantung pada lingkup dan tujuannya. Kebijakan berkembang seiring dengan berubahnya lingkungan, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi kebijakan menjadi sangat penting untuk memastikan keefektifan dan relevansinya.⁷

2. Pemerintah Daerah

Defenisi pemerintah daerah dapat ditemukan dalam “Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa pemerintah

⁷ Harry Mulya Zein dan Sisca Septiani, *Teori Dan Kebijakan Pembangunan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 1-3

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Terdapat dua bentuk utama pemerintahan daerah di dunia, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*. *Local Self Government* memberi pemerintah daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri, sedangkan *Local State Government* berfungsi sebagai unit organisasi pemerintah di daerah yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat di daerah.⁸

3. Fasilitas Pembelajaran

Fasilitas pembelajaran merupakan semua kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah atau di rumah. Fasilitas pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar.⁹

Kelengkapan fasilitas pembelajaran sangat mendukung keberhasilan dalam pembelajaran, dikarenakan dapat menarik perhatian peserta didik sehingga menumbuhkan motivasi belajar, guru dapat menggunakan metode

⁸ Tamaulina Sembiring dkk, *Sistem Pemerintah Daerah*, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 16-18

⁹ Jenri Ambarita dan Pitri Solida Simanulang, *Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2023), h. 69

pembelajaran yang lebih variatif dalam mengajar, pembelajaran terfokus kepada peserta didik dikarenakan banyaknya kegiatan belajar yang melibatkannya, materi pelajaran yang lebih mudah dimengerti oleh peserta didik.

4. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam dibangun oleh dua makna esensial yakni “pendidikan” dan “agama Islam”. PAI adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara berlanjut antara guru dan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai islam dalam jiwa, rasa, dan pikiran, serta keserasian dan keseimbangan adalah karakteristik utamanya. Dalam regulasi lain disebutkan bahwa PAI adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur’an dan Hadits.¹⁰

Pendidikan Agama Islam memberikan kepada siswa landasan moral yang kuat, sehingga mereka dapat membedakan hal yang benar dan yang salah berdasarkan ajaran agama Islam yang diajarkan kepada siswa di sekolah dan juga di rumah.

5. Daerah Terpencil

¹⁰ Mokh. Iman Firmansyah, “ Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 17, No. 2 (2019), h. 82

Daerah terpencil mencakup pengertian keterpencilan secara fisik dan kultural. Daerah terpencil secara fisik adalah suatu daerah yang jauh atau sukar untuk dijangkau oleh sarana komunikasi dan transportasi, yang dibarengi dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan. Daerah dengan kondisi ini menyebabkan masyarakatnya terkurung atau terisolasi dari daerah-daerah di sekitarnya.

Keterpencilan suatu daerah akan menimbulkan hambatan dan kesukaran dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti banyak sekolah yang berdiri dalam kondisi bangunan yang tidak layak, kekurangan ruangan kelas, tidak memiliki perpustakaan, serta belum tersedianya aliran listrik. Serta terbatasnya program pengembangan profesi guru, membuat guru kesulitan meningkatkan dan mempertahankan kualitasnya. Para guru juga sering kali bekerja dalam keterbatasan, bahkan di beberapa wilayah, guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran karena keterbatasan jumlah guru, walaupun banyak tantangan yang dihadapi masih banyak guru yang secara sukarela mengabdikan diri di pelosok negeri untuk pengetahuan.¹¹

6. Studi Kasus

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci

¹¹ Piter Joko Nugroho, "Pemetaan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Daerah Terpencil Daratan Pedalaman Kabupaten Gunung Mas", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 18, No. 1 (2017), h. 44-45

dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu

Creswell sebagaimana disebutkan oleh Sri Wahyuningsih di dalam buku *Metode Penelitian Studi Kasus* menyatakan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai prosedur sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Fokus didalam studi kasus dapat dilihat dari keunikannya.¹²

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Judul: Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor

Penulis: Arisatul Muwafiqoh

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya peningkatan mutu PAI di sekolah melalui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Aspek yang dikaji mencakup tiga hal yaitu bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor dalam peningkatan mutu PAI di sekolah, implementasi kebijakan beserta faktor pendukung dan penghambatnya, serta implikasi dari kebijakan dalam peningkatan mutu PAI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan. Objek penelitian adalah kebijakan di Kabupaten Bogor dengan instrumen penelitian berupa

¹² Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Kasus "Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya"*, (Madura: UTM Press, 2013), h. 3.

human instrument. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumen dan observasi.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah membahas peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah penelitian tersebut tidak spesifik membahas tentang fasilitas pembelajaran, melainkan lebih kepada aspek penguatan mutu secara umum. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Bogor yang secara geografis dan infrastruktur tidak termasuk sebagai daerah terpencil. Sementara itu, peneliti memilih wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan yang berbeda, baik dari segi pelaksanaan proses belajar mengajar maupun segi dukungan pemerintah daerahnya.

2. Judul: Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama islam di Sekolah Terpencil (Studi Kasus di SDN 643 Gamaru Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)

Penulis: Abdillah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 643 Gamaru, untuk mendeskripsikan usaha-usaha yang dilakukan Guru PAI dalam mengatasi

¹³ Arisatul Muwafiqoh, “Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bogor”, (Tesis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023). h. 12-47.

problematika pembelajaran PAI di SDN 643 Gamaru. Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi kasus dengan mempelajari latar belakang, keadaan suatu fenomena secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁴

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian yang dipilih merupakan daerah terpencil dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif studi kasus. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas memiliki fokus utama terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, seperti keterbatasan sarana, metode pengajaran dan kompetensi guru. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada analisis kebijakan pemerintah daerah terkait penyediaan dan pengelolaan Fasilitas pembelajaran PAI di daerah terpencil.

3. Judul: Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Pendidikan Agama Islam
Penulis: Jiddy Masfu'

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidik Pendidikan Agama Islam. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk meningkatkan mutu pendidik pendidikan agama Islam pemerintah sudah mengaturnya dengan mengeluarkan kebijakan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

¹⁴ Abdillah, "Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama islam di Sekolah Terpencil (Studi Kasus di SDN 643 Gamaru Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2021). h. 8-53.

Pendidikan Bab VI disebutkan bahwa pendidik secara umum harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.¹⁵

Penelitian Jiddy Masyfu' memiliki persamaan dengan penelitian yang akan di bahas oleh peneliti adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jiddy Masyfu' menekankan fokus penelitiannya terhadap mutu pendidik PAI atau Guru PAI. Sementara penelitian peneliti berfokus kepada fasilitas pembelajaran PAI. Penelitian diatas menelaah kebijakan pemerintah secara umum dan nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota).

¹⁵ Jiddy Masyfu', "Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Pendidikan Agama Islam", *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, (2017) h. 188-191